

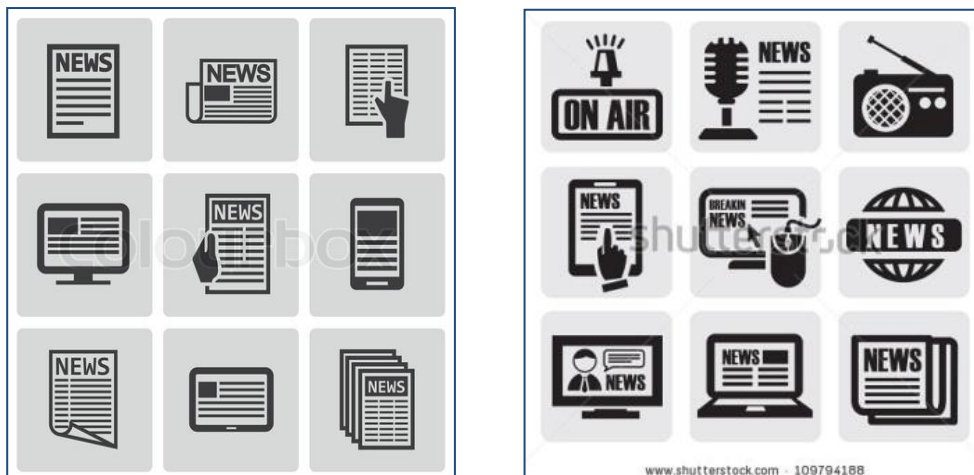


**Kementerian PPN/  
Bappenas**

## **e-Newspaper Media Online**

Sarana & Prasarana

Jumat, 22 Febuari 2019



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan  
Jakarta, Bappenas  
2019**

## **Daftar Isi**

1. PENERIMA SUBSIDI DIPERLUAS (*Media Online Kompas*)

# KOMPAS

Jumat

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

22 Februari 2019

## PERUMAHAN

# Penerima Subsidi Diperluas

**JAKARTA, KOMPAS** — Pemerintah memperluas sasaran penerima subsidi perumahan. Selain memudahkan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian RI, perluasan sasaran juga untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat umum berpenghasilan menengah ke bawah mendapatkan rumah.

Langkah memperluas sasaran penerima subsidi perumahan diputuskan dalam rapat tertutup di kediaman resmi Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (21/2/2019) sore. Dalam rapat yang dipimpin Wapres Kalla, disepakati batas penghasilan maksimal kelompok sasaran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi dinaikkan.

Semula hanya masyarakat berpenghasilan paling banyak Rp 4 juta per bulan yang berhak mendapat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan

(FLPP). Nantinya subsidi perumahan diberikan kepada masyarakat, termasuk ASN, serta anggota TNI dan Polri, yang berpenghasilan paling banyak Rp 8 juta per bulan.

Seusai rapat, Wapres Kalla menjelaskan, keputusan untuk meningkatkan batas maksimal penghasilan penerima subsidi diambil dengan pertimbangan masih banyak ASN serta anggota TNI dan Polri yang belum memiliki rumah. Dengan batas maksimal penghasilan Rp 8 juta per bulan, diharapkan kebutuhan aparatur negara akan papan bisa terpenuhi.

"Jadi, kita putuskan segera (subsidi) diberikan sampai dengan pegawai golongan III," kata Kalla.

Rapat membahas tentang pengadaan rumah bagi ASN, TNI, dan Polri itu diikuti Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofjan Djalil, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro.

### Disesuaikan

Basuki menambahkan, perubahan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dari Rp 4 juta menjadi Rp 8 juta per bulan karena menyesuaikan dengan penghasilan yang diterima ASN golongan III. Menurut dia, total penghasilan yang diterima ASN golongan III paling tinggi Rp 8,1 juta per bulan.

Sri Mulyani menjelaskan, sekitar 1 juta ASN serta anggota TNI dan Polri belum memiliki rumah. Perubahan kriteria penerima subsidi itu diharapkan memudahkan aparatur negara memiliki rumah.

"Dari total pengguna FLPP, ASN hanya 12 persen, sedangkan TNI-Polri 3 persen," kata Sri Mulyani. (NTA)

Masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja di sektor informal dinilai memiliki kemampuan keuangan yang baik untuk bisa membeli rumah. Penyediaan rumah berbasis komunitas dinilai menjadi salah satu cara agar mereka bisa mengakses kredit pemilikan rumah bersubsidi dan Kebanyakan dari mereka tidak bisa mengakses subsidi perumahan yang disediakan pemerintah, seperti skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Hal ini terbukti dari data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP). Dari total penerima FLPP sejak 2010 sampai 2018 sebesar 577.767 unit, penerima FLPP yang berprofesi sebagai wiraswasta hanya 46.452 orang atau 8,04 persen. Lainnya adalah pekerja swasta formal, pegawai negeri sipil (PNS), dan TNI Polri.

Hashtag Berita :

#Infrastruktur #RPJMN #FLPP #MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia #KementerianPPN/Bappenas #PPDPP #Perumahan #SatuJutaRumah #RealEstatIndonesia #PelaksanaanProyekNasional #KementerianPUDanPerumahanRakyat #BUMN